

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 107 (REVISI 2009)
PADA TRANSAKSI GADAI EMAS
(Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Nur Rahma Nike Febriani Eder
NPM. 1551030121
Program Studi : Ekonomi Syariah
(Konsentrasi Akuntansi Syariah)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 107 (REVISI 2009)
PADA TRANSAKSI GADAI EMAS
(Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Nur Rahma Nike Febriani Eder
NPM. 1551030121
Program Studi : Ekonomi Syariah
(Konsentrasi Akuntansi Syariah)**

**Pembimbing I
Pembimbing II**

**: Dr. H. Nasruddin, M.Ag
: Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Perkembangan akuntansi syariah yang cukup pesat ditandai dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satunya yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan badan usaha milik negara berbentuk lembaga keuangan nonbank yang bergerak di bidang jasa, yang memiliki izin resmi dalam kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan atas dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir ditengah-tengah masyarakat dengan menarik minat masyarakat khususnya pada produk pembiayaan gadai emas. Transaksi gadai emas ini tentunya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi dan penerapan akuntansi yang tepat. Peraturan akuntansi gadai syariah yang masih terpecah-pecah menyebabkan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang gadai syariah. Panduan dalam pembiayaan gadai emas terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/200 dengan akad pendamping akad *ijarah* yang terdapat dalam PSAK No. 107 (Revisi 2009) tentang akad *ijarah*. Yang mana PSAK No. 107 (Revisi 2009) ini merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan transaksi gadai emas dengan akad pendamping akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada produk pembiayaan gadai emas.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur perpustakaan, dokumen-dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim dan penelitian terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bersifat memaparkan dengantujuan memperoleh gambaran terhadap sesuatu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim dalam penerapan akuntansi *ijarah* pada produk pembiayaan gadai emas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 107 (Revisi 2009). Dalam hal pengakuan dan pengukuran biaya perbaikan objek *ijarah*, Pegadaian Syariah Way Halim belum menerapkan biaya tersebut. Dan dalam hal penyajian, Pegadaian Syariah Way Halim belum menyajikan pendapatan *ijarah* sesuai dengan PSAK No. 107 (Revisi 2009). Hal ini dikarenakan tidak adanya pencatatan atas laporan keuangan secara khusus yang menyajikan pendapatan *ijarah*.

Kata Kunci : Gadai Syariah (*Rahn*), PSAK 107, Transaksi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadaai Emas (Studi Pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)

Nama

: Nur Rahma Nike Febriani Eder

NPM

: 1551030121

Jurusan

: Ekonomi Syari'ah

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. Nasruddin, M.Ag
NIP. 1958 0924 199031003

Pembimbing II,

Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak, Akt
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.107 (REVISI 2009) PADA TRANSAKSI GADAI EMAS (STUDI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH WAY HALIM BANDAR LAMPUNG”** disusun oleh :
**Nur Rahma Nike Febriani Eder, NPM : 1551030121, Program Studi :
Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada
Hari/Tanggal: Jum'at, 27 Desember 2019**

TIM PENGUJI


Ketua : Dr. H. Ahmad Isnaeni, M.Ag 

Sekretaris : Dinda Fali Rifan, M.Ak 

Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak 

Penguji II : Dr. H. Nasruddin, M.Ag 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ...

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."¹ (Q.S Al-Baqarah : 283)



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid*, (Jakarta : Al-Hadi Media Kreasi, 2014), h. 49

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti dan cintaku untuk kedua malaikat tak bersayapku yang disetiap sujudnya tak pernah henti mendoakan kebaikan serta kesuksesanku, Papa (Edi Safli .N) dan Mama (Erdawati). Dan teruntuk uniku Elva Rahma Dhona Eder, Amd. Keb dan Dwika Rahma Augusta Eder, S. Kom. Terima kasih untuk setiap doa, semangat, perhatian dan motivasi yang tiada hentinya kalian berikan untukku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 01 Februari 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari Bapak Edi Safli .N dan Ibu Erdawati. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. TK Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2004
2. SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2009
3. SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2012
4. SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, Desember 2019

Yang Membuat,

Nur Rahma Nike Febriani Eder

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil 'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, tidak lupa shalawat beringing salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dan izin penelitian kepada peneliti.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan, semangat dan motivasi selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Nasruddin, M. Ag selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staff akademik pegawai Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu pembelajaran dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan FEBI yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi kepada penulis.
8. PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung yang telah bersedia memfasilitasi serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan riset penelitian.
9. Sahabat-sahabatku **“I’M_KeeBeeGall”**, Melianah, Bella Chenia Meitasir, Galuh Nurani Amalia Rizki dan Anggun Maryani yang selalu memberikan senyum, tawa, dukungan dan keributan yang selalu kita buat karena kita ribut dimana-mana, khususnya di meja bundar.
10. Anabul-anabulku Upin, Mba’ Adek, Nanang, Bagong, Lio, Kimmy, yang suka nemenin Unike ngalong ngerjain skripsweet sampe malem. Makasi yaa, hehe.

11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2015, khususnya Akuntansi Syariah kelas C yang selalu menghiasi hari-hari penulis dalam waktu 4 tahun ini.

12. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi perkembangan ilmu pendidikan Akuntansi Syariah. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis

Nur Rahma Nike Febriani Eder



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian	12
G. Manfaat Penelitian	13
H. Metode Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	18
1. Dasar Hukum Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	21
2. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	24
3. <i>Rahn</i> Emas, Mekanisme Prosedur <i>Rahn</i> Emas (Gadai Emas), Perhitungan Tarif Dalam <i>Rahn</i> Emas.....	26
B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi <i>Ijarah</i>	38
1. Pengakuan dan Pengukuran PSAK No. 107 (Revisi 2009).....	40
2. Penyajian dan Pengungkapan PSAK No. 107 (Revisi 2009)	42
C. Tinjauan Pustaka.....	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	48
1. Sejarah Pegadaian Syariah	49
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	50
3. Budaya Perusahaan	51
4. Struktur Organisasi.....	51
5. Produk-Produk Pegadaian Syariah Way Halim	53
B. Akad yang Digunakan Pada Pegadaian Syariah Way Halim.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung..... 60
- B. Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Tentang Akad *Ijarah* Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung..... 66
 - 1. Pengakuan dan Pengukuran PSAK No. 107 (Revisi 2009)..... 67
 - 2. Penyajian PSAK No. 107 (Revisi 2009) 70
 - 3. Pengungkapan PSAK No. 107 (Revisi 2009)..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar Taksiran Logam (STL)	36
Tabel 2.2	Perhitungan Nilai Taksiran	37
Tabel 2.3	Persentase <i>Marhun bih</i> Terhadap Nilai Taksiran Jaminan	38
Tabel 2.4	Tarif <i>Ijarah</i>	39
Tabel 2.5	Perhitungan Tarif <i>Ujrah</i> per 10 Hari	39
Tabel 2.6	Penggolongan <i>Marhun bih</i> dan Tarif Administrasi.....	41
Tabel 2.7	Jurnal Biaya Perolehan	45
Tabel 2.8	Jurnal Pendapatan Sewa	45
Tabel 2.9	Jurnal Biaya Perbaikan Objek <i>Ijarah</i> Rutin.....	46
Tabel 2.10	Jurnal Biaya Perbaikan Objek <i>Ijarah</i> Tidak Rutin.....	46
Tabel 4.1	Perhitungan Masa Sewa Maksimal	66
Tabel 4.2	Perhitungan Biaya-Biaya Dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas	67
Tabel 4.3	Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> Berdasarkan PSAK No. 107 (Revisi 2009) Dengan Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Way Halim	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Model Bisnis Gadai Syariah	29
Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Riset
- Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3. Daftar Standar Taksiran Logam (STL)
- Lampiran 4. Rekapitulasi Transaksi Kasir
- Lampiran 5. Contoh Surat Bukti Rahn (SBR)
- Lampiran 6. Brosur Produk Pegadaian
- Lampiran 7. Surat Izin Usaha Pergadaian
- Lampiran 8. Surat Keterangan Domisili Nama / Perusahaan
- Lampiran 9. PSAK 107 Tentang Akuntansi *Ijarah* (Revisi 2009)
- Lampiran 10. Fatwa DSN MUI
- Lampiran 11. Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini serta untuk menghindari kerancuan atau kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa istilah yang digunakan terkait skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 107 (Revisi 2009) PADA TRANSAKSI GADAI EMAS (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan judul skripsi ini maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan beberapa istilah penting dari judul ini.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

2. Penerapan

Implementasi atau penerapan dalam bahasa Indonesia adalah pelaksanaan. Implementasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).²

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/analisis>

²DEPDIKBUD, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 (Revisi 2009)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 tentang Akuntansi *Ijarah* (PSAK No. 107 Revisi 2009) dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang kemudian disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK). Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *ijarah*.³

4. Gadai (*Rahn*)

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu barang atau harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pembiayaan pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Yang mana barang jaminan ini memiliki batas waktu tertentu sampai pihak yang menggadaikan (*rahin*) bisa membayar dan melunasi semua utangnya.

5. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah (*Ar Rahn*) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.⁴

³Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah)*, 2019 (On-line), tersedia di: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>

⁴Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h.24

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisis tentang penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada transaksi gadai emas pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka alasan memilih judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Penggunaan produk jasa gadai emas syariah yang dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat dapat memberikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan mencairkan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan proses yang mudah, aman, dan terpercaya. Dalam hal ini Pegadaian Syariah tentunya memerlukan penerapan serta perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan gadai syariah. Pegadaian Syariah harus tetap di kawal dalam menyediakan produk pembiayaan jasa layanan gadai syariahnya. Agar tidak menimbulkan dan terciptanya penyimpangan maupun penyelewengan terhadap sistem ataupun peraturan yang telah ada yang dapat mencemarkan citra perusahaan. Dan juga untuk tetap menjaga loyalitas nasabah agar semakin yakin, percaya dan tertarik dengan produk pembiayaan gadai syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian. Sehingga sudah seharusnya penerapan akuntansi dengan PSAK No. 107 diterapkan sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah.

2. Alasan Subjektif

Menurut peneliti, penelitian tentang penerapan akuntansi *ijarah* yang menggunakan PSAK No.107 (Revisi 2009) dinilai sangat tepat dan relevan, mengingat disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah Akuntansi Syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada khususnya masih terbilang relatif muda karena baru pada tahun 1992 dimulai adanya perbankan syariah, sehingga perlu dilakukan pengayaan dari beberapa praktek usaha syariah dan pencatatan dalam pembuatan laporan keuangan yang berbasis syariah.⁵

Dewasa ini perkembangan akuntansi syariah berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut salah satunya ditandai dengan hadirnya lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN,

⁵Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 4

yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.⁶

Berkembangnya instansi keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lainnya menimbulkan besarnya kebutuhan akan akuntansi, sehingga dapat mendorong pesatnya pertumbuhan bisnis di segala bidang baik di Indonesia maupun dunia.

Lembaga keuangan berbasis syariah yang saat ini cukup menarik minat kalangan masyarakat adalah Pegadaian. PT Pegadaian (Persero) Syariah adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan atas dasar hukum gadai. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990, menegaskan satu misi yang harus diemban dan diamanahkan oleh Pegadaian, yaitu mencegah adanya praktik pembiayaan yang berbau *riba*. Peraturan dan misi yang sekaligus menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian ini tidak berubah dan masih berlaku sampai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2002 yang merupakan landasan PT Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan keuangan sampai saat ini.

⁶Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013*, Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 36

Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian untuk Unit Layanan Gadaai Syariah (ULGS) sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.⁷ Pegadaian Syariah pertama kali berdiri pada bulan Januari tahun 2003 di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadaai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika.

Dalam praktik operasionalnya Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah hampir sama. Yang membedakan diantara keduanya yaitu dimana Pegadaian Konvensional masih dijumpai adanya sistem bunga (*riba*) terhadap dana yang dipinjamkan, sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan sistem syariah berlandaskan nilai-nilai Islam yang jauh dari praktik *riba*.

Pegadaian Syariah (*Ar Rahnu*) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian Syariah di Indonesia diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi Unit Layanan Gadaai Syariah di berbagai kota di Indonesia.⁸ Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang

⁷Kartika Candra Priliana dan Nur Hisamuddin, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadaai Emas Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2015, h. 2

⁸Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah....*, h. 24

menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur).⁹ Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sendiri yang melakukan praktik ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam hadist ini : *“Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah SAW, kemudian menjawab: “Bohong! Sesungguhnya Aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku pastilah Aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”.* (H.R Bukhari dan Muslim)¹⁰

Yang menjadi landasan dalam praktik gadai syariah yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang bunyinya :¹¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)*

⁹Rachmad Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016, Vol. 1, No. 2, h. 94-95

¹⁰Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah - Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 174

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2014), h. 49

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

[180] Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Dalam realitas kehidupan sosial ekonomi, seringkali masyarakat dihadapkan pada kondisi dimana kebutuhan yang harus mereka penuhi sangatlah beragam, akan tetapi berbanding terbalik dengan alat pemuas kebutuhan yang tidak seimbang. Pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada kondisi dimana mereka memerlukan dana dalam bentuk sejumlah uang tunai tetapi pada kondisi tersebut yang mereka punya yaitu berupa bentuk selain uang tunai (barang). Dalam situasi seperti itu pastinya yang masyarakat inginkan adalah mendapatkan sejumlah uang tunai dengan proses dan waktu yang cepat. Pilihan transaksi yang digemari oleh masyarakat dalam kondisi seperti itu yaitu dengan cara menggadaikan barang-barang berharga milik mereka seperti menggadaikan emas. Sesuai dengan slogannya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, Pegadaian Syariah hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pilihan layanan jasa gadai emas dengan produk pembiayaan *Rahn* (gadai syariah). Dengan lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah yang tersedia di seluruh Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai dengan prosedur pengajuan gadai yang sangat mudah dan tanpa harus membuka rekening.¹²

¹²Pegadaian Syariah (On-Line), tersedia di: <https://pegadaiansyariah.co.id/>

Penggadai (*Rahin*) yang mempunyai barang berupa emas (*Marhun*) baik emas perhiasan maupun emas lantakan datang ke Pegadaian Syariah, dimana Pegadaian Syariah sebagai pihak yang menerima gadai (*Murtahin*). Kemudian *rahin* mengisi formulir berupa data-data yang diperlukan oleh pihak *murtahin*. Setelah itu *rahin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* untuk di cek dan di taksir nilainya. Setelah nilai *marhun* diketahui, *murtahin* memberikan penjelasan berupa informasi terkait besarnya nilai pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diperoleh oleh *rahin*. Jika *rahin* menyetujui besarnya *marhun bih* yang didapat, barulah *murtahin* akan memproses transaksi gadai (*rahn*) tersebut dan menyimpan *marhun* di brankas dalam gudang penyimpanan yang telah disediakan.

Pada dasarnya dalam melakukan transaksi gadai emas syariah, Pegadaian Syariah menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) disini dimaksudkan dengan menahan benda atau barang bergerak (*marhun*) milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan atas pinjaman pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah dimaksudkan sebagai penarikan biaya atas biaya sewa tempat penyimpanan (biaya *ujrah*) dan pemeliharaan atau perawatan atas benda atau barang bergerak milik nasabah yang sudah melakukan akad. Dimana *ijarah* sendiri merupakan suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemidahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud

adalah sewa operasi (*operating lease*).¹³ Dengan kedua akad ini memungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan milik nasabah yang telah melakukan akad sebelumnya.

Transaksi gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah dalam setiap aktivitasnya tentunya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Pembiayaan gadai emas syariah tentunya memerlukan penerapan akuntansi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai. Peraturan akuntansi gadai syariah yang masih terpecah-pecah menyebabkan belum adanya peraturan akuntansi yang secara khusus mengatur tentang gadai syariah. Panduan dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* dengan akad pendamping akad *Ijarah* (PSAK 107 Revisi 2009) yang merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: *Akuntansi Ijarah* (PSAK 107) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59:

¹³Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 : Akuntansi Ijarah*, (Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta, 2009), h. 1-2

Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.¹⁴ PSAK 107 diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2010. Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* dijelaskan pada ayat 2 bahwa, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadaai (*rahin*). Kemudian pada ayat 3 dijelaskan, ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dan pada ayat 4 dijelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*. Ketentuan dalam pembiayaan *ijarah* ini terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang mana disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Melihat banyaknya minat masyarakat yang menggunakan pembiayaan gadai emas syariah dengan akad pendamping *ijarah*, memberikan urgensi tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga loyalitas nasabah dan mempertahankan eksistensi kesyariahan perusahaan baik berupa produk maupun layanan jasa yang ditawarkan, khususnya pada bidang akuntansi dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang tepat bagi para

¹⁴Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah : PSAK 107 (Ijarah)*, 2019 (On-Line), tersedia di: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>

informan, namun tetap dalam konteks syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 107 (Revisi 2009) PADA TRANSAKSI GADAI EMAS (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”**.

D. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberikan titik fokus pada penelitian ini yaitu pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi terkait akad *ijarah* atas pembiayaan gadai emas yang akan disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 (Revisi 2009) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan PSAK No. 107 tentang akuntansi *ijarah* pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu, untuk mengetahui penerapan PSAK No. 107 tentang akuntansi *ijarah* pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Sesuai dengan judul yang berkaitan, adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi *ijarah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam penerapan PSAK No. 107 tentang akuntansi *ijarah* yang kaitannya dengan produk gadai emas syariah. Dan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka dari itu penelitian ini di fokuskan untuk memperoleh gambaran data di lapangan mengenai penerapan PSAK No. 107 pada transaksi gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan. *Field Research* digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan.¹⁵ Penelitian ini dimaksudkan guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) dan transaksi gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya buku, catatan, dokumen, website dan refrensi lainnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 107 dan transaksi gadai emas syariah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang sesuatu yang sedang diteliti.

¹⁵Kartini Kartano, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 64

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui cara observasi dan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Didiek Permadi selaku pengelola agunan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang ada di PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung, serta jurnal-jurnal peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁶ Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari subjek atau objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.¹⁷ Observasi yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui atau mengamati praktek gadai emas syariah dengan akad pendamping PSAK No. 107 (akad *Ijarah*) yang terjadi pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti dengan cara tanya-jawab. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Didiek Permadi selaku Pengelola Agunan dan staf pegawai yang ada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

¹⁶Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 227

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.

Dalam hal ini, dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh profil PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung, arsip-arsip dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk dianalisis, kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat di objek penelitian dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan.

Dengan menggunakan metode analisis ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis secara deskriptif penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) terhadap transaksi gadai emas pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Gadai Syariah (*Rahn*)

Rahn atau yang dikenal juga dengan gadai syariah merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. *Rahn* sendiri diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mana dijelaskan bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada prinsipnya, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Ar-Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *al-tsuut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan, kata *ar-rahin* bermakna *al-habs*, artinya tertahan.¹⁸ Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatstsir ayat 38, yang bunyinya :¹⁹

¹⁸Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 251

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., h. 576

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ

Artinya : "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".

Yang mana dalam penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap diri manusia bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Mereka tidak akan bebas sebelum mereka memenuhi kewajibannya dan menjalani hukumannya. Mereka (manusia) tergadaikan, yaitu dimana mereka diazab di dalam neraka disebabkan oleh amal perbuatannya sendiri.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sebagaimana yang menjadi landasan syariah dalam praktik gadai syariah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang bunyinya :²⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., h.49

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

[180] Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Dalam satu kondisi dimana masyarakat membutuhkan pinjaman dana tunai secara cepat, lazimnya masyarakat menjadikan emas sebagai barang berharga yang mereka simpan dan kemudian menjadikannya sebagai objek *rahn* (gadai) sebagai jaminan atas utang yang mereka terima. Dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa *rahn emas* diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002), yang mana dijelaskan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* yang ditanggung oleh penggadai (*rahin*) yang besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan tidak boleh berdasarkan nilai pinjaman.

Hal-hal terkait *rahn* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum dalam praktik gadai emas syariah (*Rahn*), diantaranya yaitu :

a) Al-Qur'an

Sebagaimana yang menjadi landasan syariah dalam praktik gadai syariah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang bunyinya :²¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

[180] Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

²¹*Ibid*

b) As-Sunnah

Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sendiri yang melakukan praktik ini sebagaimana dalilnya, *“Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.”* (H.R Bukhari dan Muslim)²²

Dari Abu Hrairah r.a Nabi SAW bersabda, *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”*. (H.R Asy’ Syafii, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah)²³

c) Ijma’ Ulama

Kesepakatan atas diperbolehkannya tentang status hukum gadai telah disepakati oleh para jumbuh ulama. Hal tersebut dimaksudkan sebagaimana berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika Beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, hal ini menunjukkan bahwa tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan

²²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 196

²³Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 358

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.²⁴

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Setelah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan kajian panjang mulai dari menimbang, mengingat dan memperhatikan beberapa aspek penting terkait gadai syariah (*rahn*), DSN-MUI kemudian memutuskan dan menetapkan fatwa terkait gadai syariah (*rahn*) :

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn Emas*.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8

2. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Rukun dan syarat gadai syariah (*rahn*) diantaranya, yaitu sebagai berikut :

a) Rukun *Rahn*

Rukun gadai syariah yang harus dipenuhi oleh pegadaian dalam melaksanakan praktik gadainya syariahnya, yaitu :²⁵

1) *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa (*baligh*), berakal, bisa dipercara dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan barang jaminan (gadai).

3) *Al-Marhun* (barang jaminan / barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4) *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5) *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

²⁵Lina Aulia Rahman, *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015, Vol. 2 No. 11

b) Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan praktik gadai syariah, terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu :²⁶

1) *Rahin* dan *Murtahin*

Keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mummayiz*.

2) *Marhun bih* (utang)

- (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
- (b) Utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan).
- (c) Utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat maupun kadarnya.

3) *Marhun (borg/ barang jaminan)*

Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun (borg)* anatara lain, yaitu :

- (a) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- (b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat).
- (c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

²⁶Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah*...., h. 254-256

- (d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.
- (e) Barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misal harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
- (f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya.
- (g) Barang jaminan itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

4) *Sighat*

Sighat akad disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.

3. *Rahn* Emas, Mekanisme Prosedur *Rahn* Emas (Gadai Emas), Perhitungan Tarif Dalam *Rahn* Emas

a. *Rahn* Emas

Pembiayaan *Rahn* (gadai syariah) yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan proses pencairan dana yang cepat, hanya dalam waktu 15 menit dana dapat diperoleh dan juga penyimpanan barang jaminan yang aman. Barang jaminan ini dapat

berupa emas, baik dalam bentuk emas lantakan, logam mulia maupun emas perhiasan.

Emas merupakan logam mulia yang mana memiliki harga relatif stabil dan bernilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan emas yang setiap tahunnya menunjukkan nilai positif. Emas merupakan barang berharga yang hampir dimiliki setiap orang, baik itu logam mulia ataupun khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai secara cepat, maka ia dapat menggadaikan barang berharganya yaitu berupa emas ke Pegadaian ataupun bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ketika seseorang menggadaikan emasnya, lalu melunasi semua pinjamannya, maka emas tersebut dapat kembali kepadanya. Dapat kita lihat bahwasannya, ketika seseorang membutuhkan dana tunai dengan cara yang cepat, maka ia tidak perlu menjual perhiasaannya untuk mendapatkan pencairan dana tunai tersebut. Masyarakat dapat menggunakan jasa gadai emas yang ada di lembaga Pegadaian.

Dengan persyaratan pembiayaan gadai yang mudah yaitu cukup dengan membawa fotocopy KTP ataupun identitas resmi lainnya, lalu menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan bermotor cukup membawa BPKB dan STNK asli.

Terdapat beberapa keunggulan yang ada dalam *Rahn*, yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- 3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- 4) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman.
- 7) Tanpa perlu membuka rekening.
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- 9) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Berikut ini merupakan skema model bisnis gadai syariah yang cepat, mudah, aman dan terpercaya.

²⁷Pegadaian Syariah (On-Line), tersedia di: <https://pegadaiansyariah.co.id/>

Gambar 2.1
Skema Model Bisnis Gadai Syariah



Sumber : Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/>

Dalam melakukan gadai emas syariah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon penggadai (*rahin*). Hal tersebut yaitu terkait biaya administrasi dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). **Biaya administrasi**, berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa ongkos atau biaya yang ditanggung oleh penggadai (*rahin*) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.²⁸ Dalam hal ini artinya penggadai (*rahin*) harus mengetahui secara rinci ongkos atau biaya-biaya apa saja yang mereka perlukan, yang mana ongkos atau biaya ini dikeluarkan oleh pihak pegadaian (*murtahin*). Biaya administrasi merupakan biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh pegadaian (*murtahin*) dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Ongkos atau biaya ini meliputi biaya pengorbanan formulir,

²⁸Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

jasa penaksiran, biaya materai, print out, fotocopy dan sebagainya. Yang mana semua ongkos atau biaya ini harus dibayarkan dimuka. Tetapi, pada kenyataannya tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui secara rinci biaya administrasi tersebut.

Sedangkan **biaya penyimpanan atau pemeliharaan**, dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa biaya penyimpanan atau pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) merupakan tanggungan penggadai (*rahin*). Biaya sewa tempat penyimpanan atau pemeliharaan ini diterapkan dengan menggunakan akad *ijarah*.²⁹ Yang mana dengan akad *ijarah* ini penggadai (*rahin*) menggunakan jasa pegadaian (*murtahin*) untuk menyimpan atau memelihara barang gadaianya sampai batas waktu yang ditentukan (jangka waktu gadai berakhir). Dari sinilah pegadaian menetapkan sejumlah biaya untuk sewa tempat tersebut. Dari biaya sewa tempat inilah pihak pegadaian memperoleh pemasukan pendapat yang sah dan halal. Karena pegadaian hanya menerima upah (*fee*) atas jasa penyimpanan atau pemeliharaan barang gadai yang mereka berikan kepada para nasabah (penggadai). Biaya sewa tempat ini diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk pada diperbolehkannya penerapan akad *ijarah*.

²⁹Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

b. Mekanisme Prosedur *Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh ulama *fiqh*. Operasional pegadaian syariah merupakan suatu gambaran yang menggambarkan hubungan diantara nasabah dengan pegadaian. Berikut ini merupakan teknis Pegadaian Syariah dalam mekanisme prosedur dan operasionalnya.³⁰

- 1) Nasabah menjaminkan barang gadaian kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya akad, seperti biaya penitipan barang, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada pelunasan atau perpanjangan transaksi oleh nasabah.
- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pinjaman bisa dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu :

- a) Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.

³⁰Dicki Hartanto, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 105

- b) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya.
- c) Setelah proses tersebut, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi.

Untuk pengambilan pinjaman, prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
- 2) Jumlah yang dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (ijarah) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
- 3) Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.

c. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

Selain itu ada pula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *rahin* dan *murtahin* setelah membuat dan menyepakati akad *Rahn*, yaitu sebagai berikut :³¹

- 1) *Rahin* menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun* (barang jaminan), penetapan besarnya taksiran *Marhun*, *Marhun Bih* (uang pinjaman), tarif biaya pemeliharaan *Marhun* (*Mu'nah*), biaya administrasi atau biaya riil perpanjangan jangka waktu, biaya riil

³¹PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim, *Surat Bukti Rahn (SBR)*, Dokumentasi

penundaan lelang, dan biaya riil lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau nota transaksi (struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *Marhun Bih* dan uang kelebihan.

- 2) Barang yang diserahkan sebagai *Marhun* adalah milik *Rahin* dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
- 3) *Rahin* menyatakan telah berhutang kepada *Murtahin* dan berkewajiban untuk membayar pelunasan yang terdiri dari *Marhun Bih*, *Mu'nah* dan biaya riil perpanjangan jangka waktu.
- 4) *Mu'nah* per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.
- 5) *Mu'nah* dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pembayaran oleh *Rahin*, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
- 6) *Murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan *Murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* dan *Mu'nah* sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *Murtahin*.

- 7) *Rahin* dapat melakukan ulang *Rahn*, minta tambahan *Marhun Bih* dan penundaan lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan *Mu'nah* dan biaya riil perpanjangan jangka waktu yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran *Marhun* pada saat ulang *Rahn*, maka *Rahin* wajib melakukan pelunasan.
- 8) Terhadap *Marhun* yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *Rahin*, terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi 10 (sepuluh) hari dari pelunasan, *Marhun* tetap belum diambil, maka *Rahin* sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *Murtahin* atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
- 9) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, perpanjangan akad, maka *Murtahin* berhak melakukan penjualan *Marhun* melalui lelang.
- 10) Hasil penjualan lelang *Marhun* setelah dikurangi *Marhun Bih*, *Mu'nah*, biaya riil lelang (jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *Rahin*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, *Rahin* menyatakan setuju untuk menyalurkan

uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *Murtahin*.

- 11) Jika hasil penjualan lelang *Marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *Rahin* berupa *Marhun Bih*, *Mu'nah*, biaya riil lelang (jika ada) dan bea lelang maka *Rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.
- 12) *Rahin* dapat datang sendiri untuk melakukan ulang *Rahn*, minta tambah *Marhun Bih*, mengangsur *Marhun Bih*, penundaan lelang, pelunasan dan menerima *Marhun*, dan menerima uang kelebihan lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotocopy KTP *Rahin* dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
- 13) *Rahin* atau kuasanya dapat melakukan perpanjangan dan pelunasan akad di seluruh Cabang/Unit Pegadaian Syariah *online*.
- 14) Dalam hal *Rahin* atau kuasanya melakukan pengambilan *Marhun* atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti *Rahn* (SBR).
- 15) Apabila *Rahin* meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *Murtahin* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris *Rahin* sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

16) Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

c. Perhitungan Tarif yang Terdapat Dalam Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah

Dalam memberikan pembiayaan pinjaman kepada nasabahnya pegadaian syariah memiliki sejumlah perhitungan tarif terkait pembiayaan gadai emas. Perhitungan ini meliputi perhitungan besarnya nilai pinjaman (*marhun bih*), perhitungan tarif *ijarah* serta penggolongan biaya administrasi. Adapun harga taksiran yang dijadikan dasar dalam menentukan nilai taksiran yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Standar Taksiran Logam (STL)

Jumlah Karat	Harga (Rp)
24	633.847
23	607.437
22	581.026
21	554.616
20	528.206
19	501.796
18	475.385
17	448.975
16	422.565
15	396.154
14	369.744
12	316.924
10	264.103
8	211.282
6	158.462
LANTAKAN	621.053

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai taksiran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perhitungan Nilai Taksiran

$\text{Nilai Taksiran} = \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas}$
--

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Syariah

Ilustrasi :

Rahin memiliki perhiasan emas dan ingin menggadaikannya ke Pegadaian Syariah. Perhiasan emas tersebut berupa cincin 16 karat dengan berat 3 gram.

Diketahui : $\text{STL} = \frac{1}{16} = \text{Rp } 26.410$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas} \\ &= \text{Rp } 26.410 \times 16 \times 3 \\ &= \text{Rp } 1.267.639 \end{aligned}$$

Jadi, Rp 1.267.639 adalah nilai taksiran yang Pegadaian Syariah gunakan untuk menghitung besarnya nilai pinjaman yang nantinya dapat diperoleh oleh *rahin*.

1) Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman (*marhun bih*)

Besarnya *marhun bih* yang nantinya akan diperoleh oleh *rahin* ditentukan berdasarkan penggolongan *marhun bih* dan persentase penentuan *marhun bih* dari nilai taksiran yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Berikut ini disajikan tabel persentase *marhun bih* terhadap nilai taksiran jaminan.

Tabel 2.3
Persentase *Marhun Bih* Terhadap Nilai Taksiran Jaminan

Golongan	<i>Marhun Bih</i> (Rp)	Persentase Penentuan <i>Marhun Bih</i> dari Taksiran untuk <i>Marhun Emas</i>
A	50.000 – 500.000	95 %
B1	550.000 – 1.000.000	92 %
B2	1.050.000 – 2.500.000	92 %
B3	2.550.000 – 5.000.000	92 %
C1	5.100.000 – 10.000.000	92 %
C2	10.100.000 – 15.000.000	92 %
C3	15.100.000 – 20.000.000	92 %
D	>20.100.000	93 %

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Syariah

Ilustrasi :

Rahin memiliki *marhun* berupa perhiasan emas dan ingin menggadaikannya ke Pegadaian Syariah. *Marhun* tersebut berupa cincin 16 karat dengan berat 3 gram. Setelah di taksir oleh penaksir, cincin tersebut memiliki nilai taksiran sebesar Rp 1.267.639.

Nilai maksimal pinjaman = Nilai taksiran x Persentase *marhun bih*

$$= \text{Rp } 1.267.639 \times 92\%$$

$$= \text{Rp } 1.166.278 \text{ dibulatkan menjadi}$$

$$\text{Rp } 1.160.000$$

Jadi, nilai maksimal uang pinjaman yang

akan diperoleh oleh *rahin* adalah sebesar

$$\text{Rp } 1.160.000$$

2) Perhitungan Tarif *Ijarah*

Tarif *ijarah* yang harus dibayarkan oleh *rahin* dihitung untuk masa 4 bulan dan dibayarkan per 10 hari. Besarnya tarif *ijarah* ditentukan oleh Pegadaian Syariah seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Tarif *Ijarah*

Golongan	Marhun bih (Rp)	Tarif Ijarah per 10 hari	Jangka Waktu
A	50.000 - 500.000	Rp 45 / 10.000 taksiran	120 hari
B1	501.000 – 1.000.000	Rp 71 / 10.000 taksiran	
B2	1.000.000 – 2.500.000		
B3	2.500.000 – 5.000.000		
C1	5.100.000 – 10.000.000	Rp 71 / 10.000 taksiran	
C2	10.100.000–15.000.000		
C3	15.100.000–20.000.000		
D	>20.100.000	Rp 62 / 10.000 taksiran	

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Syariah

Untuk menghitung besarnya tarif *ijarah* sendiri menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perhitungan Tarif *Ujrah* per 10 hari

$$\text{Tarif Mu'nah / Ujrah per 10 hari} = \text{Taksiran/10.000} \times \text{Tarif Ijarah per 10 hari} \times \text{Jangka waktu/10}$$

Ilustrasi :

Apabila *rahin* melakukan pinjaman dengan mengambil semua pinjaman maksimalnya sebesar Rp 1.160.000 dalam jangka waktu pinjaman selama 10 hari, maka tarif *ijarah*nya adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif } Mu'nah \text{ 10 hari} &= \text{Taksiran}/10.000 \times \text{Tarif } Ijarah \text{ per 10 hari} \times \\
 &\quad \text{Jangka waktu}/10 \\
 &= \text{Rp } 1.267.639/\text{Rp } 10.000 \times \text{Rp } 71 \times 10 \\
 &\quad \text{hari}/10 \\
 &= \text{Rp } 9.000
 \end{aligned}$$

Jadi, tarif *ujrah* yang dikenakan kepada *rahin* yaitu sebesar Rp 9.000. Jika *rahin* ingin melunasi *marhun bihnya* maka biaya pelunasannya yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Uang pinjaman} + \text{Biaya } Ujrah \\
 &= \text{Rp } 1.160.000 + \text{Rp } 9.000 \\
 &= \text{Rp } 1.169.000
 \end{aligned}$$

3) Penggolongan Tarif Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah (*murtahin*) dalam hal pelaksanaan akad gadaai dengan penggadai (*rahin*). Ongkos atau biaya ini meliputi biaya pengorbanan formulir, jasa penaksiran, biaya materai, print out, fotocopy dan sebagainya. Yang mana semua ongkos atau biaya ini harus dibayarkan dimuka. Biaya administrasi yang ditanggung oleh *rahin* didasarkan pada penggolongan *marhun bih*. Penggolongan *marhun bih* dan biaya administrasi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Penggolongan *Marhun Bih* dan Tarif Administrasi

Golongan	<i>Marhun Bih</i> (Rp)	Tarif Adm (Rp)
A	50.000 - 500.000	2.500
B1	501.000 – 1.000.000	10.000
B2	1.000.000 – 2.500.000	20.000
B3	2.500.000 – 5.000.000	35.000
C1	5.100.000 – 10.000.000	50.000
C2	10.100.000 – 15.000.000	75.000
C3	15.100.000 – 20.000.000	100.000
D	>20.100.000	125.000

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Syariah

Ilustrasi :

Karena *rahin* melakukan pinjaman dengan mengambil semua pinjaman maksimalnya yaitu sebesar Rp 1.160.000, maka nilai pinjaman (*marhun bih*) tersebut termasuk ke dalam golongan B2 dengan biaya administrasi sebesar Rp 20.000 yang dibayarkan secara langsung dimuka saat melakukan akad.

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi *Ijarah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) merupakan standar akuntansi yang dijadikan sebagai akad pendamping mengenai *ijarah* untuk transaksi yang berkaitan dengan sewa *ujroh*. Dimana sewa *ujroh* yang dimaksudkan ini merupakan biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun bih*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) ini dijadikan sebagai prinsip akuntansi berlaku umum yaitu sebagai akad pendamping dikarenakan belum adanya prinsip akuntansi keuangan syariah yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan *rahn*. PSAK No.107 (Revisi 2009) ini merujuk kepada beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya yaitu :

1. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan syarat memenuhi berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan. Fatwa ini juga menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam *rahn*.
2. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menjelaskan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa juga menjelaskan mengenai ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan dalam pembiayaan *rahn*.

Adapun beberapa definisi yang terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) ini, yaitu sebagai berikut :³²

- a. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.
- b. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*).
- c. Nilai wajar adalah jumlah aset yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d. Obyek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- e. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Terdapat pula beberapa karakteristik terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) ini, antara lain sebagai berikut :³³

- 1) *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

³²Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 : Akuntansi Ijarah*..., h. 1-2

³³*Ibid.* h. 2-3

- 2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang *dijarahkan* dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara :
 - a) Hibah;
 - b) Penjualan sebelum akhir masa kad;
 - c) Penjualan pada akhir masa akad;
 - d) Penjualan secara bertahap.
- 3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian
- 4) Spesifikasi obyek *ijarah*, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 (Revisi 2009) yang dijadikan sebagai akad pendamping dalam pembiayaan *rahn* digunakan dalam menentukan pendapatan sewa tempat penyimpanan (biaya *ujrah*). Yang mana di dalamnya terdapat ketentuan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian, yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Beberapa ketentuan terkait pengakuan dan pengukuran yang ada dalam PSAK No. 107 (Revisi 2009), yaitu meliputi :

- a. Biaya perolehan, untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.

Tabel 2.7
Jurnal Biaya Perolehan³⁴

Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Ijarah	xxx	
Kas/Utang		xxx

Sumber : Data diolah, 2019

- b. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tetapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Tabel 2.8
Jurnal Pendapatan Sewa³⁵

Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Piutang Sewa	xxx	
Pendapatan Sewa		xxx

Sumber : Data diolah, 2019

- c. Biaya perbaikan objek *ijarah*, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
- 1) Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

³⁴Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 240

³⁵*Ibid*

Tabel 2.9
Jurnal Perbaikan Objek *Ijarah* Rutin³⁶

Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya Perbaikan	xxx	
Utang		xxx

Sumber : Data diolah, 2019

- 2) Jika perbaikan tidak rutin atas objek *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Tabel 2.9
Jurnal Perbaikan Objek *Ijarah* Tidak Rutin³⁷

Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya Perbaikan	xxx	
Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

Sumber : Data diolah, 2019

2. Penyajian dan Pengungkapan

Beberapa ketentuan terkait penyajian dan pengungkapan yang ada dalam PSAK No. 107 (Revisi 2009), yaitu meliputi :

a. Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan, dan sebagainya.

b. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Penjelasan isi umum akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

- a) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 - b) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
 - c) Agunan yang digunakan (jika ada);
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*; dan
- 3) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian
1.	Penelitian Adistya Isini dan Herman Karamoy, yang berjudul “ <i>Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado</i> ”, tahun 2017. ³⁸	Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan <i>rahn</i> belum mempunyai PSAK khusus yang mengaturnya, tetapi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN MUI tentang

³⁸Adistya Isini dan Herman Karamoy, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2017, Vol. 5, No. 2

		<p><i>rahn</i>, dan PSAK No 107 mengenai <i>ijarah</i> untuk transaksi sewa <i>ujroh</i>.</p> <p>Penerapan akuntansi <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado untuk transaksi mengenai sewa tempat (<i>ujroh</i>) sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang <i>ijarah</i>. Serta untuk transaksi lainnya pihak pegadaian menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan produk pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>).</p>
2.	<p>Penelitian Nur Hisamuddin dan Bagus Budi Priatmono, yang berjudul “<i>Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 dan 102 Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember</i>”, tahun 2016.³⁹</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan akuntansi emas untuk produk BSM gadai emas Bank Syariah Mandiri mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai</p>

³⁹Nur Hisamuddin dan Bagus Budi Priatmono, *Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 dan 102 Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2016, Vol 4, No. 2

		dengan PSAK 107. Pelaksanaan akuntansi emas untuk produk BSM cicil emas atau investasi emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 102.
3.	Penelitian Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamuddin, yang berjudul “ <i>Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember</i> ”, tahun 2015. ⁴⁰	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (<i>rahn</i>). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (<i>rahn</i>). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya.
4.	Penelitian Lina Aulia Rahman,	Hasil penelitian menunjukkan

⁴⁰Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamuddin, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015

	yang berjudul “ <i>Analisis Kesesuain Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI</i> ”, tahun 2015. ⁴¹	bahwa aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang <i>ijarah</i> , PSAK 59 tentang <i>qardh</i> , serta PAPSI tahun 2013. Aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan Pegadaian. Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan biaya <i>ijarah</i> , penerapan lelang apabila tidak sanggup membayar, dan Pegadaian Syariah tidak memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut.
5.	Penelitian Sri Handayani, yang berjudul “ <i>Pengakuan dan</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk gadai yang

⁴¹Lina Aulia Rahman, *Analisis Kesesuain Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan, 2015, Vol. 2, No. 11

	<p><i>Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 di Pegadaian Pamekasan</i>”, tahun 2012.⁴²</p>	<p>dijaminakan di Pegadaian Syariah Pamekasan sebagian besar hanya barang perhiasan emas saja sehingga tidak ada biaya pemeliharaan tetapi hanya biaya penyimpanan dengan menggunakan akad <i>ijârah</i>. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah memenuhinya, sedangkan biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek <i>ijârah</i> dalam <i>ijârah Muntahiya bi al-Tamlîk</i> masih belum ada karena barang yang digadaikan hanya perhiasan emas.</p>
--	---	---

Sumber : Data diolah, 2019

⁴²Sri Handayani, *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 di Pegadaian Pamekasan*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial & Ilmu Keagamaan Islam, 2012, Vol. 9, No, 1

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid*. Jakarta : Al-Hadi Media Kreasi, 2014.
- DEPDIKBUD. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- Handayani, Sri. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 di Pegadaian Pamekasan, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial & Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 9 No 1 2012.
- Hartanto, Dicki. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012.
- Hisamuddin, Nur dan Bagus Budi Priatmono. Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 dan 102 Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 4 No. 2, 2016.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 : Akuntansi Ijarah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009.
- Isini, Adistya dan Herman Karamoy. Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Kartano, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Mandar Maju, 2010.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2015.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Nasution, Rachmad Saleh. Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2011.

-----. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2015. Ed 4.

Priliana, Kartika Candra dan Nur Hisamuddin. Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2015.

PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim. *Produk-produk Pegadaian Syariah*. Dokumen Brosur. 2019.

Rahman, Lina Aulia. Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 11, 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah - Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Umum, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahman. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.

-----. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013*. Jakarta : Salemba Empat, 2009. Edisi 2.

Didiek Permadi, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim, Bandar Lampung, 24 Juli 2019

Indah Nurulia, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim, Bandar Lampung, 03 Agustus 2019

Juanda, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim, Bandar Lampung, 03 Agustus 2019

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah)*, 2019 (On-line), tersedia di: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah : PSAK 107 (Ijarah)*, 2019 (On-Line), tersedia di: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/analisis>

Pegadaian Syariah (On-Line), tersedia di: <https://pegadaiansyariah.co.id/>

